



Gonjang-ganjing

DANA

DESA



PONTIANAK, SP - Kepala Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Ibrahim, didemo puluhan warga demo, pada Selasa, 19/ Januari 201. Demo ini disebabkan kurangnya transparansi penggunaan Dana Desa (DD).

Seharusnya, alokasi DD yang dikucurkan Pemerintah Pusat per tahun, senilai Rp1 miliar lebih, bisa secara bertahap memperbaiki infrastruktur desa. Namun sayangnya, tiap kali berlangsung Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Kuala Karang sejak tahun 2018, jarang warga yang diikutsertakan sehingga mereka tak tahu-menahu soal penggunaan dana tersebut.

Padahal, pemerintah tingkat desa, wajib meminta masukan dari warganya terkait program apa saja yang akan dicanangkan. Umpamanya, pembangunan tandon air hujan karena tanah di desa tersebut, tak memiliki debit air bersih. Akibatnya, warga selama ini memanfaatkan air hujan, terutama untuk diminum, menanak nasi, atau mencuci pakaian.

Akumulasi masalah terkait pembangunan desa, tidak transparannya alokasi DD, dan nasib korban bencana alam laut yang belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Desa, akhirnya menyulut aksi massa. Pada



Yusran Anizam
Sekda Kubu Raya

Pekab sudah mengupayakan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan keuangan dengan penggunaan CMS dan Siskudes. Sistem ini sangat membantu sekali pemerintah desa untuk tertib tata pengelola keuangan, adminitrasi desa dan pertanggungjawaban lainnya yang terintegrasi dengan baik.



Ibrahim
Kades Kuala Karang

Maaf, emangnya Musrenbangdes harus ngundang ribuan masyarakat. Saya rasa cukup mewakili masyarakat. Sepengetahuan saya, di nama-nama seperti itu. Kalau dari Muspika memang harus hadir.